

POSISI DAN RELASI AKTOR DALAM INISIASI PERLUASAN TAPAK KONSERVASI BERBASIS “*IMPORTANT BIRD AND DIVERSITY AREAS*” DI PEGUNUNGAN JAWA BAGIAN BARAT

(Actor's Position and Relation in the Initiation of Important Bird and Diversity Areas Based Conservation Sites Expansion on Western Java's Upland)

Yoppie Christian¹, Adi Widyanto¹, Andriansyah¹, & Desmiwati²

¹Burung Indonesia, Jl. Dadali No. 32 Bogor, Indonesia; email: lakulintang@gmail.com, a.widyanto@burung.org, @burung.org

²Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, Jl. Cihelut, Bogor, Indonesia; email: desmiwati.wong@gmail.com

Diterima 2 April 2020, direvisi 23 Oktober 2020, disetujui 2 Nopember 2020

ABSTRACT

Western Java's upland is a sanctuary of important biodiversity in Indonesia for avifaunas, primates and mammals. Particularly for avifaunas, the upland becomes the last sanctuary after the disturbance and distraction by anthropogenic activities. This kind of situation raises needs to expand conservation site as an effort to protect the biodiversities. This research aims to find opportunities through the lens of actors. This research uses Collaboration/Conflict, Legitimacy, Interest and Power (CLIP) frameworks to identify responses, positions, and inter-actor relations if expansion of conservation site is initiated based on the Important Birds and Diversity Areas (IBAs). The result shows that out of five clusters of research sites, the Important Bird and Diversity Areas of Southern Bandung has some indicators which enable collaboration in the expansion. From the actor perspectives, there are five existing preconditions to support the implementation for expansion, namely availability of landscape, willingness of the right holders, opportunities for sharing management, concordance with provincial spatial plan, and low conflict potentials. To implement the expansion, participatory multistakeholders mapping on selected areas need to be conducted and action plan for integrated landscape management should be implemented.

Keywords: Conservation; actor; Important Bird and Diversity Areas; western Java's upland; stakeholder.

ABSTRAK

Dataran tinggi di wilayah Jawa bagian barat merupakan wilayah perlindungan keanekaragaman hayati penting di Indonesia, baik avifauna, primata, dan mamalia. Bagi avifauna, wilayah dataran tinggi adalah perlindungan terakhir setelah wilayah dataran rendahnya mengalami gangguan dan distraksi oleh aktivitas manusia. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk memperluas tapak-tapak konservasi untuk melindungi keragaman hayati tersebut. Kajian ini bertujuan untuk mencari peluang perluasan tapak konservasi dengan melihat masalah dari perspektif aktor. Kajian ini menggunakan *Collaboration/Conflict, Legitimacy, Interest, and Power (CLIP) Framework* untuk mengidentifikasi respon, posisi, dan relasi antar-aktor jika perluasan area konservasi berbasis *Important Bird and Diversity Areas* (IBA) diinisiasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari lima kluster yang diteliti, wilayah *Important Bird and Diversity Areas* di Bandung Selatan memiliki beberapa indikator yang memungkinkan adanya kolaborasi dalam perluasan tapak konservasi. Dari perspektif aktor, terdapat lima prakondisi yang mendukung implementasi perluasan yakni ketersediaan lanskap, kesediaan pemegang hak, peluang pengelolaan dan pengawasan bersama, kesesuaian dengan rencana tata ruang provinsi, serta tingkat potensi konflik yang rendah. Untuk mewujudkan perluasan, pemetaan pemangku kepentingan secara partisipatif di lokasi terpilih perlu untuk dilakukan sekaligus untuk merumuskan rencana aksi bagi suatu pengelolaan lanskap secara terpadu.

Kata kunci: Konservasi; aktor; *Important Bird and Diversity Areas*; pegunungan Jawa bagian barat; pemangku kepentingan.

I. PENDAHULUAN

Secara global terjadi peningkatan luasan wilayah lindung terestrial yakni dari 14,7% di tahun 2016 menjadi 14,9% di tahun 2018. Angka pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah lindung perairan yang naik dari 10,2% di tahun 2016 menjadi 16,8% di tahun 2018. Progres ini dicapai karena adanya konektivitas dan integrasi antara wilayah lindung dengan lanskap yang lebih luas serta dikelola secara multipihak, efektif, dan mampu membendung tingkat kehilangan keanekaragaman hayati (UNEP-WCMC, IUCN, & NGS, 2018).

Pada lingkup nasional, wilayah lindung terestrial terus tertekan, terlebih di pulau padat penduduk seperti Jawa. Persentase tutupan hutan Jawa adalah yang paling kecil dibandingkan pulau besar lain yakni 2,3% dari total tutupan hutan di Indonesia. Secara khusus, kondisi hutan di Jawa Tengah dan Jawa Barat sedang mengalami tekanan. Meski indikasi deforestasi tidak ada lagi (MoEF, 2018) namun luas kawasan hutan di Jawa Barat sampai tahun 2015 hanya 22,12% atau seluas 820.378 ha (BPS, 2018a) dan masih bertahan di kawasan pegunungan tropis (Nijman, 2001). Di Jawa Tengah, luasan kawasan hutan negara di tahun 2016 sebesar 20% (651.021 ha) dari total luasan areanya (BPS, 2018b). Persentase masing-masing wilayah yang kurang dari 30% belum memenuhi target perencanaan tata ruang daerah. Secara global *UN-National Strategic Plan on Forest* berkomitmen mencegah degradasi dan pencapaian target tutupan hutan tiap negara penandatanganan sebesar 30% di tahun 2030 (PPID KLHK, 2018).

Hutan di Jawa mengalami tekanan besar oleh faktor-faktor demografis dan aktivitas antropogenik lain seperti agrikultur dan infrastruktur transportasi maupun pemukiman (MoEF, 2018). Dengan komposisi penduduk mencapai 56,7% dari total penduduk Indonesia, kompetisi antara manusia dan alam senantiasa terjadi. Bencana hidrometeorologis yang terjadi dalam satu dekade terakhir yakni

rata-rata 78% dibandingkan 22% bencana geologis (BNPB, 2016) menunjukkan adanya faktor perubahan lingkungan yang berimplikasi pada manusia secara langsung. Pada tahun 2019 tercatat bahwa dari 2.277 kejadian bencana, hampir 90% merupakan bencana hidrometeorologi. Belum lagi adanya ancaman krisis air yang dihadapi Pulau Jawa pada tahun 2040 (Bappenas, 2019; WEPA, 1999). Hal ini mengindikasikan adanya faktor kegagalan manusia dalam mengelola lingkungan.

Kondisi di hutan Jawa Tengah dan Jawa Barat tidak berkesesuaian dengan potensi keanekaragaman hayati di dalamnya yang relatif sangat kaya. Dari aspek keragaman hayati jenis burung, mamalia, dan reptil, di Jawa Barat terdapat ragam burung yang ada dalam daftar satwa terancam punah seperti elang jawa (*Nisaetus bartelsi*), raja udang kalung biru (*Alcedo euryzona*) (Rombang & Rudyanto, 1999). Selain itu juga terdapat satwa endemik seperti owa jawa (*Hylobates moloch*), lutung jawa (*Trachypithecus auratus*) (Sontono, Widiana, & Sukmaningrasi, 2016), dan macan tutul (*Panthera pardus*) (Gunawan, Prasetyo, Mardiasuti, & Kartono, 2009). Empat vertebrata endemik paling terancam punah terdapat di kawasan ini, yaitu kukang jawa (*Nycticebus javanicus*), poksai kuda (*Garrulax rufifrons*), katak api (*Leptophryne cruentata*), dan ekek geling jawa (*Cissa thalasinna*) (Higginbottom, Collar, Symeonakis, & Marsden, 2019). Kekayaan sekaligus kerentanan satwa penting ini menjadikan hutan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai habitat bernilai tinggi dari aspek keragaman hayati dan jasa ekosistem. Pulau Jawa dinyatakan sebagai salah satu kawasan penting untuk jenis endemik atau Endemic Bird Area-EBA (Balen, Nijman, & Sozer, 1999).

Sebagai basis cakupan penelitian, kajian ini menggunakan lingkup wilayah yang telah ditetapkan oleh Birdlife International sebagai *Important Bird and Diversity Areas* (IBAs). IBA merupakan situs yang secara internasional

diakui memiliki signifikansi bagi konservasi, baik burung maupun keragaman hayati lain serta kemanfaatannya bagi manusia dalam menyediakan sumber pangan, bahan mentah, air, pengatur iklim dan perlindungan dari banjir, serta untuk kebutuhan spiritual dan rekreasi (BirdLife International, 2014). Definisi dan kriteria ini menyebabkan cakupan wilayah IBAs melintasi seluruh wilayah, baik hutan konservasi, hutan produksi, bahkan areal penggunaan lain (APL) sepanjang terdapat indikasi burung penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Burung digunakan sebagai indikator karena keberadaan burung dapat menjadi subjek kajian yang relatif mudah dibandingkan hidupan liar lain. Selain itu, keberadaan burung dapat memberikan indikasi sehat atau tidaknya suatu ekosistem (Alexandrino *et al.*, 2016).

Kajian ini melingkupi 21 lokasi IBAs di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah namun untuk mempermudah kaji lapang dan analisis, ke-21 IBA tersebut dikelompokkan dalam lima klaster, sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Sebagai suatu wilayah lintas administrasi dan multifungsi, keberadaan aktor yang beragam dalam suatu wilayah IBA tentu memberikan tantangan sekaligus peluang bagi upaya perluasan tapak konservasi di pegunungan Jawa bagian barat. Kutub konfliktual antara kebutuhan konservasi keanekaragaman hayati dan kepentingan antropogenik memunculkan pertanyaan “masih adakah peluang perluasan tapak-tapak konservasi untuk menyelamatkan Pulau Jawa dari krisis ekologi dan menyediakan habitat yang representatif untuk melestarikan keanekaragaman hayati Jawa di pegunungan bagian barat pulau ini?” Meski diakui bahwa selama ini masih ada konflik antar-kepentingan atas sumber daya (Adiwibowo, Satria, & Kartodihardjo, 2019; Marina & Dharmawan, 2011) dan *gap* yang sering terjadi antar-aktor, baik secara legal maupun implementasi dalam pengelolaan hutan Jawa (Ekawati, Budiningsih, Sylviani, Suryandari, & Hakim, 2015).

Tulisan ini mencoba menyajikan jawaban atas pertanyaan penelitian di atas dengan mendasarkan kajiannya pada relasi aktor-aktor konservasi di wilayah kajian. Posisi dan relasi aktor dipandang turut memberikan pengaruh bagi upaya-upaya perluasan tapak konservasi di wilayah pegunungan Jawa bagian barat, khususnya terhadap kebijakan (Schusser *et al.*, 2016). Hasil kajian diharapkan dapat memenuhi dua tujuan yakni memetakan aktor-aktor konservasi serta mengkaji potensi sinergi antar-aktor untuk memperluas tapak konservasi di wilayah kajian. Kajian ini juga diharapkan dapat memperluas tingkat analisis aktor dari yang selama ini lebih banyak dilakukan pada lingkup terbatas, baik pada tematik fungsi hutan (Fauziah, Diniyati, & Firdaus, 2014; Puspitojati, Darusman, Tarumingkeng, & Purnama, 2012) maupun terbatas pada pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (Harada, 2003; Shah & Baylis, 2015).

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lanskap pegunungan Jawa bagian barat yang meliputi wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat yang melingkupi 21 pegunungan yang disinyalir merupakan IBAs menurut BirdLife International yakni Dataran Tinggi Dieng, Gunung Slamet, Gunung Ciremai, Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Wayangwindu, Gunung Malabar, Gunung Masigit, Gunung Limbung, Gunung Tangkubanparahu, Gunung Bukit Tunggul, Gunung Bukit Kerenceng, Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Talaga Bodas, Gunung Cakrabuana, Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Halimun, dan Gunung Salak. BirdLife International merilis bahwa area pegunungan ini merupakan area penting bagi burung-burung langka dan endemik (BirdLife International, 2018). Ke-21 area ini merupakan bagian dari 53 IBA di Pulau

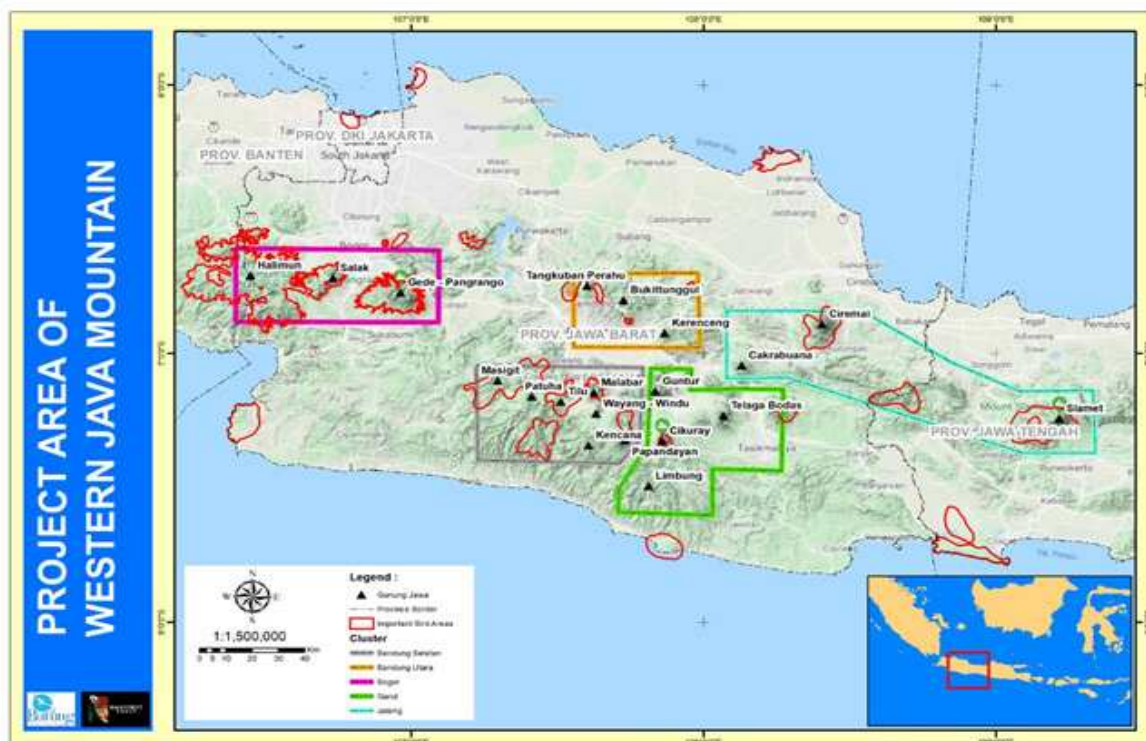
Jawa dan Bali dan bagian dari total 228 IBA di Indonesia (Gambar 1).

B. Pengumpulan Data

Untuk memudahkan pengambilan data dan informasi, dari 21 gunung tersebut dilakukan pembagian area menjadi lima klaster di mana tiap klaster terdiri dari beberapa gunung lokasi IBA yang secara geografis berdekatan dan dikelola serta bersentuhan dengan aktor yang sama. Kelima klaster tersebut adalah Klaster Jawa Tengah (meliputi Dataran Tinggi Dieng, Gunung Slamet, dan Gunung Ciremai); Klaster Bandung Utara (meliputi Gunung Tangkubanparahu, Gunung Bukit Tunggul, dan Gunung Krenceng); Klaster Bandung Selatan (meliputi Gunung Tilu, Gunung Patuha, Gunung Wayangwindu, Gunung Malabar, Gunung Masigit, dan Gunung Limbung); Klaster Garut (meliputi Gunung Guntur, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Gunung Talaga Bodas, dan

Gunung Cakrabuana); serta Klaster Bogor (meliputi Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Halimun, dan Gunung Salak).

Berdasarkan pembagian lima klaster tersebut, data dan informasi primer didapatkan dari aktor-aktor yang bersinggungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di klaster tersebut, baik pada tingkat regulasi nasional maupun pelaksana di daerah. Aktor-aktor yang menjadi sumber data primer melalui wawancara adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), khususnya di bidang konservasi; Perum Perhutani, baik pusat, provinsi, maupun Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di masing-masing klaster; Taman Nasional; Balai Konservasi Sumber Daya Alam; *International Non-Governmental Organisation* (INGO) dan NGO lokal; perguruan tinggi di masing-masing klaster; serta masyarakat desa hutan (baik berbasis desa maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan) di masing-masing



Sumber (Source): Burung Indonesia (2019)

Gambar 1 Peta lokasi *Important Bird and Diversity Areas* sebagai lokasi kajian
 Figure 1 *Important Bird and Diversity Areas* map as research locations.

tapak. Sebagai data pendukung, digunakan data sekunder berupa studi literatur untuk mengelaborasi informasi berkaitan dengan lokasi tapak.

C. Analisis Data

Penelitian dilakukan berbasis lanskap sehingga wilayah kajian tidak hanya ditujukan pada kawasan konservasi menurut perundangan di Indonesia (kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam) melainkan juga di wilayah-wilayah non-kawasan konservasi seperti APL serta hutan-hutan yang sudah terkonservasi (*conserved*) oleh suatu institusi pengelolaan tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari KLHK bahwa sekitar 80% hidupan liar yang terancam berada di luar kawasan konservasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan & Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010). Dengan demikian maka keterlibatan aktor-aktor di luar rejim kawasan konservasi memiliki arti penting dalam kajian ini.

Untuk analisis data, kajian aktor konservasi menggunakan kerangka kerja *Collaboration/Conflict, Legitimacy, Interest, dan Power* (CLIP) (Chevalier, Buckles, & Daniel, 2008). CLIP dimaksudkan untuk mengetahui posisi aktor terhadap isu perluasan jejaring dan tapak konservasi serta melihat relasi antar-aktor terhadap isu yang sama, apakah bersifat konflik atau potensial kolaboratif. Ini menjadikan masukan penting bagi lembaga yang hendak menginisiasi perluasan jejaring dan tapak konservasi dengan melibatkan banyak aktor di tingkat tapak (Chevalier & Buckles, 2019).

Analisis sosial CLIP akan menggambarkan posisi *stakeholder* dalam suatu permasalahan dengan melihat empat faktor yakni: 1) *Power* (P), 2) *Interest* (I), 3) *Legitimacy* (L), dan 4) Relasi antar-*stakeholder* (bisa berupa *Collaboration* atau *Conflict*). *Power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan, termasuk di dalamnya

adalah sumber daya ekonomi, kekayaan, otoritas politik, kemampuan memaksa, akses pada informasi atau alat komunikasi. *Legitimacy* adalah pengakuan oleh pihak lain (secara faktual maupun secara hukum) atas hak dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. *Collaboration* ataupun *Conflict* merupakan relasi sosial yang terbentuk pada pihak-pihak atas situasi yang terjadi dan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pencapaian solusi atas masalah (Chevalier *et al.*, 2008).

Terdapat delapan kategori aktor dalam analisis sosial berdasarkan CLIP yaitu:

1. Kategori PIL (dominan): *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, legitimasi tinggi.
2. Kategori PI (kuat): *power* sangat kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui atau legitimasinya lemah.
3. Kategori PL (berpengaruh): *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, klaim diakui atau legitimasinya kuat.
4. Kategori IL (rentan): tidak punya *power*, *interest* terpengaruh, dan klaim diakui atau legitimasinya kuat.
5. Kategori P (dorman): *power* sangat kuat, *interest* tidak terpengaruh, klaim tidak diakui.
6. Kategori L (dihargai): klaim diakui, *interest* tidak terpengaruh, *power* tidak kuat.
7. Kategori I (marjinal): *power* tidak kuat, *interest* terpengaruh, klaim tidak diakui dan tidak kuat.
8. Kategori non-*stakeholder*: pihak yang tidak memiliki *power*, *interest*, dan legitimasi.

Penentuan “*Power*” kuat atau lemah, “*Interest*” terpengaruh atau tidak terpengaruh, serta “*Legitimacy*” diakui atau tidak, dinilai berdasarkan skala sikap yang didapatkan secara kualitatif selama wawancara dan dikonfirmasi dengan pernyataan aktor lain (misalnya B) terhadap aktor yang diidentifikasi (misalnya A). Respon atas aktor lain (B) mengindikasikan seberapa besar “*Power*” dan “*Legitimacy*” A, sedangkan pengukuran

“*Interest*” A terlihat pada saat wawancara (skala nilai diberikan ukuran “+” untuk kuat dan “-“ untuk lemah yang akan diberi nilai secara akumulatif setelah penilaian dari semua aktor didapatkan).

Data dan temuan kajian lapang juga akan ditarik secara deduktif menjadi generalisasi secara umum terhadap seberapa besar peluang suatu area untuk menjadi suatu tapak konservasi ataupun tidak. Hal ini berangkat dari tipe respon aktor yang ada di dalam maupun yang berinteraksi dengan tapak tersebut. Analisis aktor akan membantu untuk masuk dalam jantung masalah, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan memprioritaskan tujuan ke depan (Grimble & Wellard, 1997).

Kajian ini masih bersifat eksploratif, yakni sebatas untuk menjajagi potensi-potensi perluasan tapak konservasi berdasarkan pola relasi antar-aktor di lima area IBAs. Oleh karena itu, terdapat batasan bahwa bentuk organisasi, peran, tanggung jawab, batasan geografis, dan di mana batas kewenangan antar-aktor belum dapat ditentukan dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendekatan Lanskap Berbasis IBAs

Berdasarkan pengertian “pendekatan lanskap yang merujuk suatu area di mana terdapat interaksi antara manusia dan ekosistem alami dan berdampingan satu sama lain (Potschin & Hines-Young, 2013) maka objek kajian melintasi beragam fungsi lahan. Lahan dapat berupa hutan, kawasan hutan, kawasan konservasi, kawasan lindung, maupun tapak konservasi sepanjang memiliki indikasi keragaman burung dan hayati lain serta menjadi habitat penting bagi keragaman hayati tersebut.

“Hutan” dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Definisi ini merujuk hutan sebagai suatu kesatuan biofisik berupa pepohonan serta persekutuan dengan alam lingkungannya sehingga yang memenuhi syarat biofisik tersebut dapat dikatakan sebagai hutan. Sementara itu “kawasan hutan” adalah “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” yang mengindikasikan adanya penempelan atribut politik pada hutan oleh pemerintah yang menetapkan suatu hutan secara yuridis untuk kepentingan orang banyak sebagai warga negara.

“Kawasan lindung” adalah istilah yang digunakan dalam rejim tata ruang, bukan rejim kehutanan, namun dapat mencakup juga kawasan hutan berdasarkan fungsi keruangannya. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional sebagai turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang- Pasal 63 menyatakan bahwa kawasan lindung terdiri dari: a) Kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan ini bisa berupa kawasan hutan lindung, kawasan gambut, dan kawasan resapan air; b) Kawasan perlindungan setempat; c) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; d) Kawasan rawan bencana alam; dan e) Kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya (Syahadat, Suryandari, & Kurniawan, 2019).

Istilah yang juga dikenal dalam konteks konservasi adalah “tapak terkonservasi” atau “*conserved area*” atau yang secara global dikenal dengan istilah *Indigenous and Community Conserved Area* (ICCA). Tapak terkonservasi merupakan area di luar kawasan hutan konservasi namun secara efektif telah dikelola oleh suatu lembaga tertentu yang mendukung fungsi pengawetan tanaman dan satwa serta ekosistemnya maupun penyangga kehidupan dan atau dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia di sekitarnya secara berkelanjutan melalui

pranata adat maupun cara efektif lainnya (Corrigan & Granziera, 2010). “Cara efektif lainnya” adalah cara-cara yang dipraktikkan masyarakat lokal tanpa adanya pranata adat seperti di komunitas indigenous sehingga bisa dikatakan juga sebagai *locally managed conserved area* yang menjalankan fungsi *secondary conservation* (IUCN-WCPA Task Force on OECMs, 2019).

Pengertian ICCA memiliki kemiripan dengan formulasi yang disusun oleh IUCN pada 22nd *meeting on Biological Diversity* (CBD) Juli 2018 di Montreal tentang Mekanisme Konservasi Efektif Berbasis Area (*Other Effective area-based Conservation Measure-OECM*). OECM didefinisikan sebagai suatu area yang memiliki batas geografis yang jelas namun bukan suatu kawasan lindung (*protected areas*), dikelola dengan baik untuk pencapaian positif dan hasil jangka panjang dari sebuah konservasi keanekaragaman hayati *in-situ*, termasuk asosiasinya dengan fungsi-fungsi dan jasa ekosistem serta meliputi juga nilai budaya, spiritual, sosial ekonomi dan nilai lokal lainnya (CBD, 2018) OECM bertujuan untuk mengintegrasikan atau membangun jembatan antara kawasan konservasi dengan area-area di mana terjadi praktik-praktik efektif dalam konservasi keanekaragaman hayati meski tak selalu bertujuan konservasi (IUCN-WCPA Task Force on OECMs, 2019; Lafoley *et al.*, 2017). OECM ataupun praktik pada tapak terkonservasi memiliki dimensi lanskap, bukan hanya dari aspek fungsi maupun statusnya seperti batasan-batasan pada regulasi nasional.

Belakangan ini terdapat tendensi pergeseran perilaku burung yang meninggalkan dataran rendah menuju dataran tinggi akibat adanya distraksi dari aktivitas antropogenik di area dataran rendah (Hoopenreijts & Lith, 2016; Lambert & Collar, 2002). Keprihatinan juga muncul dari fenomena menghilangnya burung-burung endemik dan langka di alam liar namun banyak ditemukan di pasar burung, penangkaran ataupun rumah (Chang & Eaton,

2016). Ini mengindikasikan bahwa ancaman yang dialami burung di dataran rendah cukup tinggi, termasuk indikasi adanya perubahan lanskap yang awalnya adalah habitat burung menjadi area pemanfaatan lain di luar kehutanan.

Burung memiliki arti penting, baik secara budaya, seni, falsafah, dan ekonomi. Bagi ekosistem, burung berperan sebagai penyeimbang terhadap hama, polinator, penyebar benih, dan menyediakan jasa ekosistem yang besar (BirdLife International, 2018). Burung juga menjadi indikator kesehatan ekologis suatu ekosistem (Alexandrino *et al.*, 2016) yang berperan sebagai “*mobile link*” yang menghubungkan habitat dan ekosistem melalui pergerakan mereka (Tobias, Sekercioglu, & Vargas, 2013).

Potensi pengembangan tapak konservasi sangat identik dengan pola-pola terintegrasi dalam skala lanskap (Nimwegen, 2016; Wu, Penabaz-Wiley, Njeru, & Kinoshita, 2015) dan menjawab kepentingan konservasi, sosial, dan ekonomi (Watson, Dudley, Segan, & Hockings, 2014). Pendekatan lanskap melihat bahwa pendekatan tradisional atas konservasi yang terpisah dari kepentingan lain tak bisa dijalankan secara efektif. Hutan dan keanekaragaman hayati adalah bagian dari suatu bentang alam dengan beragam kepentingan, fungsi, dan aktor yang kadang berkonflik satu sama lain (Denier *et al.*, 2015). Pendekatan lanskap menekankan pada adanya bentuk pengelolaan adaptif, pelibatan multi-*stakeholder*, dan pengakuan adanya beragam tujuan atas lahan (Sayer *et al.*, 2013).

Burung Indonesia sebagai organisasi pemerhati burung liar dan ekosistem melihat bahwa pendekatan berskala lanskap telah diaplikasikan melalui penetapan IBAs. Melalui IBAs, *stakeholder* dapat mengembangkan dan meningkatkan status konservasi suatu tapak melalui perlindungan legal, manajemen berkelanjutan, penegakan aturan, kebijakan pemanfaatan lahan, maupun aksi-aksi lokal (Waliczky *et al.*, n.d.). IUCN

telah mengembangkan indikator global *Key Biodiversity Areas* (KBA) dari IBA (IUCN, 2016).

Di Indonesia terdapat 228 area IBA yang di dalamnya terdapat 1.720 spesies burung, 166 di antaranya merupakan spesies burung terancam punah secara global dan 506 spesies endemik Indonesia (BirdLife International, 2020). Di Pulau Jawa terdapat 53 area IBA (termasuk Pulau Bali) sedangkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat terdapat 28 IBA dengan total luasan sekitar 384.426 hektare.

IBA merupakan area konservasi berbasis spesies dan habitat domisili spesies di mana di dalamnya terdapat banyak jenis pemanfaatan, fungsi maupun status. Oleh karena itu, IBA dapat diterapkan pada suatu kawasan konservasi (*protected area*), penyangga kawasan konservasi (*buffer zone*), bahkan di APL. Bila diterapkan pada suatu kawasan penyangga, IBA dapat dikembangkan menjadi kawasan OECM. Menurut IUCN-WCPA (2018), suatu tapak dapat dijadikan OECM bila memenuhi tiga kriteria yakni: a) Tidak menjadi bagian dari kawasan hutan lindung dan/atau kawasan konservasi (tidak sedang diajukan sebagai hutan lindung maupun kawasan konservasi, apalagi sebagai ruang pemanfaatan umum); b) Memiliki karakteristik konservasi esensial (memiliki batas geografis definitif, memiliki kekayaan hayati yang khas, dan dikelola secara jangka panjang); dan c) Hasil konservasi terjaga keberlanjutannya (ada aturan formal maupun informal yang menjadi alat kontrol).

Oleh karena itu, maka kajian ini menetapkan wilayah kajiannya pada area IBA tanpa melihat status, fungsi, maupun batasan-batasan secara terisolasi. Aktor-aktor yang terlibat adalah semua aktor yang berinteraksi dalam area lanskap IBA, bukan hanya aktor-aktor yang mendapat legalitas formal sebagai pengelola hutan.

B. Posisi dan Relasi Aktor di Tiap Klaster

Pada setiap aktor di masing-masing klaster, pertanyaan kunci yang diberikan

pada setiap aktor adalah: a) Bagaimana persepsi aktor terhadap peluang perluasan jejaring dan area konservasi di wilayahnya?; b) Bagaimana relasi antara aktor dengan aktor lain di wilayah kerjanya saat ini dalam implementasi konservasi dan pengelolaan hutan? Atas jawaban aktor di lapangan, posisi dan persepsi aktor dapat disajikan dalam sebuah matriks CLIP yang mengindikasikan posisi dan tingkat pengaruh masing-masing.

Dari beragam aktor yang diidentifikasi dengan menggunakan CLIP maka dapat diketahui peta kepentingan, peta kekuatan, tingkat legitimasi maupun bentuk-bentuk relasional di antara *stakeholder*. Berdasarkan kategori CLIP, matriks hasil pemetaan posisi aktor di masing-masing klaster disajikan pada Tabel 1.

C. Pola Relasi Aktor-aktor

Dari hasil identifikasi posisi aktor-aktor maka dapat dipetakan pola relasional antar-aktor dan indikasi apakah peluang perluasan tapak konservasi di dalam klaster tersebut berdiri di atas pola konfliktual ataukah kolaboratif. Untuk menguji pola relasi tersebut, Chevalier & Buckles (2008) menggunakan matriks komparasi antara seberapa besar *net gain* dan *net loss* yang akan dialami tiap aktor apabila dilakukan perluasan tapak konservasi di wilayah kerja masing-masing aktor.

Berikut adalah hasil dari analisis relasional aktor di masing-masing klaster:

1. Pada klaster Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh aktor di pegunungan Gunung Slamet, terdapat polarisasi kepentingan antar-aktor dominan yakni Perhutani dan BKSDA maupun masyarakat (baik desa maupun Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan lembaga bentukan Perhutani melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Polarisasi muncul dari perbedaan kepentingan menyangkut kualitas hutan yang ada apabila ada perubahan tata kelola hutan. Perhutani menilai bahwa kondisi hutan produksi dan hutan primer di kawasan Gunung Slamet

Tabel 1 Matriks posisi aktor menggunakan CLIP *framework*
 Table 1 Marix of actor's position using CLIP *framework*

No.	Aktor (<i>Actor</i>)	Posisi aktor di (<i>Actor's position in</i>)				
		Jawa Tengah (<i>Central Java</i>)	Bandung Utara (<i>North Bandung</i>)	Bandung Selatan (<i>South Bandung</i>)	Garut	Bogor
1	KPH Perhutani	Dominan	Dominan	Kuat	Dominan	Dominan
2	Perhutani Divre	Dominan	Dominan	Dominan	Dominan	Dominan
3	Dinas LH/ Kehutanan	Non-stakeholder	Kuat	Marjinal	Dominan	Dominan
4	Dinas PU	Non-stakeholder	Dorman	Non-stakeholder	Dorman	Dihargai
5	ATR/BPN	Non-stakeholder	Non-stakeholder	Non-stakeholder	Dihargai	Dominan
6	LSM lokal	Kuat	Kuat	Marjinal	Kuat	Kuat
7	LSM internasioal	Non-stakeholder	Kuat	Dominan	Dominan	Dorman
8	Peneliti spesies/ lanskap	Non-stakeholder	Kuat	Dominan	Dominan	Rentan
9	Perusahaan migas, tambang, wisata	Dorman	Non-stakeholder	Dominan	Marjinal	Berpengaruh
10	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Dominan	Dominan	Kuat	Dominan	Dominan
11	Tokoh masyarakat/ adat	Dominan	Non-stakeholder	Marjinal	Berpengaruh	Dominan
12	Bappeda	Non-stakeholder	Kuat	Non-stakeholder	Berpengaruh	Dominan
13	Desa	Dominan	Dominan	Marjinal	Dihargai	Dominan
14	Mahasiswa	Non-stakeholder	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul
15	Dinas Kehutanan	Tidak muncul	Dominan	Tidak muncul	Dihargai	Tidak muncul
16	Penangkar besar	Tidak muncul	Marjinal	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul
17	Dinas PMD	Tidak muncul	Dihargai	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul
18	BPBD	Tidak muncul	Marjinal	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul
19	Balai Tahura	Tidak muncul	Kuat	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul
20	Kepolisian	Tidak muncul	Tidak muncul	Marjinal	Tidak muncul	Tidak muncul
21	PTPN VIII	Tidak muncul	Tidak muncul	Dihargai	Tidak muncul	Tidak muncul
22	LMDH	Tidak muncul	Tidak muncul	Dominan	Dominan	Tidak muncul
23	Pemburu/ <i>offroader</i>	Tidak muncul	Tidak muncul	Marjinal	Dominan	Tidak muncul
24	Balai Taman Nasional	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul	Tidak muncul	Dominan

Sumber (*Source*): Data primer (*Primary data*),2019.

dalam kondisi sangat baik dan mendukung fungsi lindung kawasan maupun keanekaragaman hayatinya melalui skema *High Conservation Value Forest (HCVF)*. Di sisi lain, BKSDA menilai perlu ada bentuk perlindungan khusus pada area ini karena terdapat satwa kunci yang dilindungi seperti elang jawa, owa jawa,

monyet daun, dan poksai kuda. Aktor dominan lain yakni desa menilai bahwa proses pemanfaatan jasa ekosistem di area ini baru dimulai dan telah memberikan manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Adanya perbedaan kepentingan ini tidak mengarah pada konfliktual karena ketiga aktor tersebut sama-sama berada pada

- level* dominan. Oleh karena itu, peluang perluasan konservasi di wilayah ini dapat diwujudkan dengan “*building trust*” antara ketiga aktor dominan dalam mengelola wilayah yang sama untuk membentuk suatu lanskap konservasi multi-*stakeholder* dan menyatukan kepentingan tiga sektor yakni produksi, lindung, dan ekonomi.
2. Pada klaster Bandung Utara, hasil matriks CLIP menunjukkan bahwa Perhutani, baik Divisi Regional Jawa Barat maupun KPH masih menjadi *stakeholder* dominan dalam pengelolaan hutan karena masih ada pengaruh, tingkat kepentingan, maupun pengakuan dari lembaga. Meskipun begitu, Perhutani tidak sendiri karena Dinas Kehutanan Jawa Barat, BKSDA, serta masyarakat juga diakui memiliki pengaruh yang cukup besar. Lembaga non pemerintah, baik lokal maupun internasional juga berkontribusi penting sebagai *stakeholder* karena memiliki *resource* yang kuat dan bisa mempengaruhi opini publik. Begitu juga dengan peneliti spesies/lanskap dari perguruan tinggi yang perannya juga diakui dan berpengaruh meski tingkat legitimasinya lebih rendah daripada *stakeholder* dominan. Bappeda selaku *stakeholder* penata ruang juga dianggap berperan penting dalam pengelolaan hutan di Bandung Utara karena berkaitan dengan wilayah Bandung Utara yang masuk dalam kawasan lindung dan kawasan rawan bencana. Balai Tahura Provinsi dipandang cukup kuat dalam pengelolaan hutannya. Dari perimbangan *net gain* dan *net loss*, relasi aktor di Bandung Utara mengindikasikan adanya relasi konfliktual yang didasari oleh belum adanya komunikasi yang baik antar-aktor guna menyatukan tindak dan rencana dalam mengelola wilayahnya untuk kepentingan bersama. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya aktor dominan dan kuat namun tidak ada suatu gerak bersama yang kolaboratif secara permanen, bahkan pihak seperti pengusaha *resort* atau wisata di kawasan lindung dan rawan bencana berada di luar matriks aktor sehingga tak ada kontribusinya pada lingkungan. Untuk itu, rencana perluasan tapak konservasi di Bandung Utara mesti membangun relasi kolaboratif dan menyamakan persepsi banyak pihak terlebih dahulu.
 3. Relasi aktor di klaster Bandung Selatan menunjukkan adanya sebaran *stakeholder* yang relatif luas dan tidak terpusat di Perhutani maupun BKSDA. Peran Perhutani Divisi Regional Jabar-Banten, LSM internasional, peneliti spesies, perusahaan geotermal, serta LMDH dinilai oleh *stakeholder* lain sebagai *stakeholder* dominan. Ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan di Bandung Selatan terkelola dalam relasi yang relatif longgar, terbuka, dan memungkinkan banyak pihak untuk mengelola hutan. Isu konservasi bisa jadi terbumikan ke banyak *stakeholder* yang berada di luar pemerintah sehingga inisiatif-inisiatif non-pemerintah tampak lebih dominan dan kuat. Peran atau kontribusi pemerintah daerah dalam jejaring pengelolaan hutan di Bandung Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi yang dinilai cukup berperan sebagai *stakeholder* kehutanan. Atas temuan ini, relasi aktor di klaster Bandung Selatan cenderung kolaboratif atau memadai untuk melakukan kolaborasi skala lanskap dan inovasi konservasi keanekaragaman hayati.
 4. Relasi aktor di klaster Garut menunjukkan bahwa *stakeholder* dominan tak hanya ada di Perhutani melainkan juga pada LSM internasional, peneliti spesies/lanskap, Dinas LH serta BKSDA Jabar. Kehadiran LSM lokal juga dipandang sebagai *stakeholder* kuat dalam memberikan input mengenai kehutanan di Garut. Peran-peran dinas terbanyak ada pada kategori dihargai oleh *stakeholder* lain sehingga keberadaannya tidak bisa ditinggalkan. Perusahaan migas berada pada kategori marjinal karena dipandang hanya memiliki

interest terhadap hutan di dekat operasinya, namun kekuatan dan legitimasi dari aktor lain dinilai rendah. Dari posisi aktor tersebut, analisis relasional menunjukkan bahwa potensi kolaborasi ada di wilayah ini namun karena dominasinya ada pada Perhutani, Dinas LH, dan BKSDA sebagai penanggung jawab utama hutan maka diperlukan fasilitasi pemerintah daerah atau provinsi untuk memediasi seluruh pihak dan membangun kepercayaan (*building trust*) untuk bisa bekerja sama lintas kawasan.

5. Relasi aktor pada klaster Bogor menunjukkan banyaknya *stakeholder* yang memiliki *power* yang kuat sekaligus kepentingan serta legitimasi yang kuat (dominan). Tingkat kontestasinya akan cukup tinggi apabila hendak membangun perluasan jejaring maupun area konservasi di wilayah ini. Hal ini karena semua pihak dominan memiliki dasar justifikasi legal yang sangat kuat serta tingkat pengaruh yang tinggi di tingkat tapak. Dominasi dari pihak-pihak dominan bahkan mereduksi tingkat *power* dari peneliti lanskap yang ada di wilayah ini. Hal ini akan memberikan tantangan yang besar dalam membangun kolaborasi. Lingkup wilayah yang relatif luas dan memiliki karakter lanskap berbeda dan terfragmentasi menyebabkan relatif sulitnya membangun model kolaborasi dalam rangka perluasan tapak konservasi. Pada beragam tingkatan aktor, kekuatan praktik tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan dan kawasan konservasi masih sangat dominan. Hal ini akan membatasi munculnya inovasi-inovasi selain KSA dan KPA. Inovasi global seperti ICCA, OECM, IBA, atau *Privately Protected Area* (PPA) maupun bentuk kolaborasi antara aktor *state-non state* tidak pernah disebut dalam aturan perundangan, baik UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5

tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati, maupun UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satunya inovasi yang muncul adalah Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang aturannya belum disahkan. Secara arbitrer, KEE didefinisikan sebagai suatu kawasan yang bernilai ekosistem penting yang berada di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi (KSDAE, 2018). Dari kajian di lapangan terlihat bahwa masih ada kekhawatiran untuk mengubah status hutan sebagai implikasi kerja kolaborasi dalam konservasi. Hal ini dapat dijernihkan dengan opsi lain. Konservasi tidak selalu harus mengubah status kawasan hutan karena lebih berfokus pada tujuan praktik di dalamnya, bukan status administrasinya. Secara umum posisi dan relasi antar-*stakeholder* (atau aktor) di kelima wilayah kajian masih menunjukkan kondisi yang sama yakni adanya praktik teritorialisasi di satu sisi dan gangguan di sisi yang lain. Adanya pengelolaan oleh lembaga yang terfragmentasi dalam status dan tugas dan fungsi menyebabkan relasi antar-pihak masih bersifat konfliktual. Meski tidak secara terbuka namun setiap pihak tidak mencoba menyatukan visi masing-masing dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan hutannya secara kolaboratif. Inisiatif justru muncul dari kalangan non pemerintah dan kalangan akademisi selaku representasi habitat namun kurang mendapat respon yang signifikan dari pengambil kebijakan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara umum, tingginya diferensiasi dan polarisasi menjadi tantangan utama upaya untuk perluasan kawasan konservasi di pegunungan Jawa bagian barat. Diperlukan prakarsa politik untuk menempatkan isu konservasi sebagai isu penting dalam pembangunan daerah. Untuk itu maka peluang terbesar bagi kerja sama multi-*stakeholder* adalah pada *stakeholder* yang memiliki keterbukaan tinggi terhadap dinamika dan perubahan diskursus konservasi serta menjalin komunikasi dengan banyak aktor dominan untuk mengangkat isu konservasi di permukaan, khususnya isu yang berkaitan erat dengan kepentingan masing-masing pihak dan kepentingan umum.

Dari kelima klaster kajian berdasarkan posisi dan relasi aktor-aktor maka peluang terbesar adanya dukungan kolaborasi aktor-aktor dalam perluasan tapak konservasi adalah di wilayah klaster Bandung Selatan, diikuti klaster Jawa Tengah, klaster Garut, klaster Bandung Utara, dan klaster Bogor. Hal ini ditentukan oleh lima indikator yakni ketersediaan lanskap yang ada, kesediaan pengampu/pemegang hak kelola saat ini, adanya peluang pengelolaan dan pengawasan bersama, kesesuaian dengan rencana tata ruang provinsi, dan tingkat potensi konflik kepentingan.

B. Saran

Untuk mendapatkan informasi lebih rinci mengenai pembagian peran dan tanggung jawab multi-*stakeholder* untuk perluasan tapak konservasi di wilayah terpilih maka disarankan untuk melakukan pemetaan kepentingan dan kekuatan seluruh aktor menuju skema perencanaan kolaboratif. Hal ini mutlak dilakukan pada sebuah implementasi pengelolaan lanskap secara terpadu guna menentukan batasan siapa melakukan apa, di mana, bagaimana, dan mekanisme evaluasinya.

Memperhatikan masukan dan pola relasi aktor di lima klaster kajian, Burung Indonesia menilai bahwa model pengelolaan kolaboratif berbasis lanskap yang lintas kawasan dan multi-aktor dapat dijadikan model objek kajian di tingkat tapak untuk menentukan model perluasan tapak konservasi di wilayahnya. Hal ini karena terdapat multifungsi lahan dalam lanskap IBAs di mana tiap aktor memiliki landasan hukum dan legitimasi untuk mengelolanya. Dalam estimasi satu sampai dua tahun ke depan, bentuk dan skema pengelolaan lanskap secara terpadu di lokasi terpilih dapat dirumuskan dalam sebuah rencana aksi bersama guna menyeimbangkan antara kepentingan konservasi, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan pembuat kebijakan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun regulasi yang mengakomodasi praktik-praktik konservasi selain KSA/KPA agar lebih banyak aktor yang dapat mendukung negara dalam upaya perlindungan hutan dan sumber daya hayatinya.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Rainforest Trust yang telah mendanai kajian ini, Burung Indonesia, BirdLife International, serta Manchester Metropolitan University yang telah memfasilitasi seluruh proses kajian sejak dari persiapan sampai diseminasi hasil kajian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwibowo, S. D., Satria, A., & Kartodihardjo, H. (2019). Alternative livelihood dilemmas and the degradation of protected areas: power contestation and socio-ecological interest in Gede Pangrango National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 285 (2019) 012001.
- Alexandrino, E., Buechley, E., Piratelli, A., Ferraz, K. M. P. M., Moral, R. d., Sekercioglu, C., ..., & Couto, H. T. de. (2016). Bird sensitivity to disturbance

- as an indicator of forest patch conditions: an issue in environmental assessments. *Ecological Indicators*, 66, 269–381.
- Balen, S. Van, Nijman, V., & Sozer, R. (1999). Distribution and conservation of the javan hawk-eagle *Spizaetus bartelsi*. *Bird Conservation International*, 9, 333–349.
- BAPPENAS. (2019). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2040*. Jakarta: BAPPENAS.
- BNPB. (2016). *Risiko bencana Indonesia*. Jakarta: BNPB.
- BirdLife International. (2014). *Important bird and biodiversity areas: a global network for conserving nature and benefiting people*. Cambridge: BirdLife International.
- BirdLife International. (2018). *State of the world's birds: taking the pulse of the planet*. Cambridge: BirdLife International.
- BirdLife International. (2020). *Country profile: Indonesia*. Diakses dari <http://www.birdlife.org/datazone/country/indonesia>.
- Burung Indonesia. (2019). *Peta project area of western Java upland*. Burung Indonesia, Rainforest Trust, and Manchester Metropolitan University.
- BPS. (2018a). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jabar*. Diakses dari <https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/04/03/545/luas-kawasan-hutan-di-provinsi-jawa-barat-hektar-2016.html>
- BPS. (2018b). *Luas penggunaan lahan dan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah 2016 (ha)*. Jakarta: BPS.
- [CBD] Convention on Biological Diversity. (2018). *Protected areas and other effective area-based conservation measures*. Subsidiary Body on Scientific Technical and Technological Advice 22nd meeting, Montreal, Canada 2-7 July 2018.
- Chang, S. C. & Eaton, J. (2016). *In the market for extinction: eastern and Central Java*. Selangor: TRAFFIC.
- Chevalier, Buckles, J., & Daniel, J. (2008). *A guide to collaborative inquiry and social engagement*. Ottawa: International Development Research Center and SAGE Publication.
- Chevalier, J. M. & Buckles, D. J. (2019). *Handbook for participatory action research, planning and evaluation* (March 2019). SAS2 Dialogue. www.sas2.net
- Corrigan, C. & Granziera, A. (2010). *A handbook for the indigenous and community conserved areas registry*. Nairobi: UNEP-WCMC.
- Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L., & Stam, N. (2015). *The little sustainable landscapes book*. Oxford: Global Canopy Programme.
- Ekawati, S., Budiningsih, K., Sylviani, Suryandari, E., & Hakim, I. (2015). Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di Pulau Jawa. *Policy Brief*, 9(1).
- Fauziah, E., Diniyati, D. T.S. W., & Firdaus, N. (2014). Pemetaan stakeholder dalam pengelolaan hutan rakyat di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Agroforestry*, 2(2), 75–84.
- Grimble, R. & Wellard, K. (1997). Stakeholder methodologies in natural resource management: a review of principles, context, experiences and opportunities. *Agricultural Systems*, 55(2), 173–193.
- Gunawan, H., Prasetyo, L. B., Mardiasuti, A., & Kartono, A. (2009). Habitat macan tutul jawa (*Panthera pardus melas* Cuvier 1809) di lanskap hutan produksi yang terfragmentasi. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi*, 6(2), 95–114.
- Harada, K. (2003). Attitudes of local people towards conservation and Gunung Halimun National Park in West Java, Indonesia. *Journal of Forest Research*, 8(4). <https://doi.org/10.1007/s10310-003-0037-z>.
- Higginbottom, T., Collar, N., Symeonakis, E., & Marsden, S. (2019). Deforestation dynamics in an endemic-rich mountain system: conservation successes and challenges in West Java 1990-2015. *Biological Conservation*, 229, 152–159.
- Hoopenreijts, J. H. & Lith, B. van. (2016). *A new recipe for ecological conservation in West Java: mixing historical ingredients: land use maps and bird observations*. Nijmegen: Department of Environmental Science, Faculty of Science, Radboud University Nijmegen, the Netherlands.
- IUCN. (2016). *A global standard for the identification of key biodiversity areas* (Version 1.0). Gland: IUCN.
- IUCN-WCPA (2018). Developing capacity for a protected planet. PARKS. *The International Journal of Protected Areas and Conservation*, 24, Special Issue. Gland, Switzerland: IUCN. doi: 10.2305/IUCN.CH.2018.PARKS-24-SI.en
- IUCN-WCPA Task Force on OECMs. (2019). *Recognising and reporting other effective area-based conservation measures*. Gland, Switzerland: IUCN.
- Kementerian Kehutanan & Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2010). *Analisis kesenjangan keterwakilan ekologis dan kesenjangan pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan Burung Indonesia, Conservation International, Fauna and Flora Indonesia, Forest Watch Indonesia. The Nature Conservancy, Wetland International, Wildlife Conservation Societ.
- KSDAE (2018). *Perlindungan kawasan ekosistem*

- esensial*. Jakarta: BPEE-KSDAE KLHK.
- Lafoley, D., Dudley, N., Jonas, N., Kinnon, D. Mac, Hocking, M., & Woodley, S. (2017). An Introduction to “other effective area-based conservation measure” under Aichi Target 11 of the Convention on Biological Diversity: origin, interpretation and emerging ocean issues. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystem*, 27(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/aqc.2783>.
- Lambert, F. & Collar, N. (2002). The future for Sundaic lowland forest birds: long term effect of commercial logging and fragmentation. *Forktail*, 18, 127–146.
- Marina, I. & Dharmawan, A. (2011). Analisis konflik sumberdaya hutan di kawasan konservasi. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 5(1).
- MoEF. (2018). *The state of Indonesia's forest 2018*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia.
- Nijman, V. (2001). Spatial and temporal variation in migrant raptors on Java, Indonesia. *Emu*, 101(3), 259–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.1071/MU00022>.
- Nimwegen, P. (2016). *Improving Indonesian protected area management within an integrated landscape approach*. (Technical Report). Diakses dari <https://doi.org/DOI:10.13140/RG.2.2.36393.90724>.
- Potschin, M. & Hines-Young, R. (2013). Landscapes, sustainability and the place-based analysis of ecosystem services. *Landscape Ecology*, 28, 1053–1065.
- PPID KLHK. (2018). *Indonesia dukung peningkatan 30% tutupan hutan di tahun 2030*. Diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1144. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1144.
- Puspitojati, T., Darusman, D., Tarumingkeng, R.C., & Purnama, B. (2012). Preferensi pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan produksi: studi kasus di Kesatuan Pemangkuan Hutan Bogor. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 96–133.
- Rombang, W. M. & Rudyanto. (1999). *Daerah penting bagi burung di Jawa dan Bali*. Bogor: PKA/BirdLife International Indonesia Programme.
- Shah, P. & Baylis, K. (2015). Evaluating heterogeneous conservation effects of forest protection in Indonesia. *PLoS ONE*, 10(6): e0124872. doi:10.1371/journal.pone.0124872.
- Sayer, J., Sunderland, T., Ghazouli, J., Pfund, J.-L., Sheil, D., Meijaard, E., ..., & Oosten, C. van. (2013). Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *PNAS*, 110(21), 8349–8356.
- Schusser, C., Krott, M., Movuh, M. C. Y., Logmani, J., Devkota, R. R., Maryudi, A., & Salla, M. (2016). Comparing community forestry actors in Cameroon, Indonesia, Namibia, Nepal and Germany. *Forest Policy and Economics*, 68, 81–87.
- Sontono, D., Widiana, A., & Sukmaningrassa, S. (2016). Aktivitas harian lutung jawa (*Trachypithecus auratus sondaicus*) di kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi Jawa Barat. *Jurnal Biodjati*, 1(1), 39–47.
- Syahadat, E., Suryandari, E., & Kurniawan, A. (2019). Kajian strategi penataan ruang wilayah pada kawasan hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 89–104.
- Tobias, A., Sekercioglu, C., & Vargas, F. (2013). Key topics. In D. Macdonald & K. Wilis (eds.), *Conservation Biology 2*. John Wiley and Son Ltd.
- UNEP-WCMC, IUCN, & NGS. (2018). *Protected planet report*. Cambridge, UK; Gland, Switzerland; Washington, D.C., USA: UNEP-WCMC, IUCN and NGS.
- Waliczky, Z., Fishpool, L. D. C., Butchart, S. H. M., Thomas, D., Heath, M. F., Hazin, C., ..., & Allinson, T. S. (n.d.). *Important Bird and Diversity Areas (IBAs): their impact on conservation policy, advocacy and action*. Bird Conservation International. <https://doi.org/DOI:10.1017/S0959270918000175>.
- Watson, J.E.M., Dudley, N., Segan, D.B., & Hockings, M. (2014). The performance and potential of protected areas. *Nature*, 515, 67-73. doi:10.1038/nature13947
- WEPA. (1999). *WEPA outlook on water environmental management in Asia 2018*. Tokyo: Ministry of the Environment.
- Wu, W., Penabaz-Wiley, S. M., Njeru, A. M., & Kinoshita, I. (2015). Models and approaches for integrating protected areas with their surroundings: a review of the literature. *Sustainability*, 7, 8151–8177. <https://doi.org/doi:10.3390/su7078151>.